

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Nias selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) Tahun terakhir (2006-2011) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang (2011-2016).

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5)

Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Nias yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya akan menjadi salah satu input dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

4.1.1. Infrastruktur

- a). Masih terdapatnya jalan menuju ibukota kecamatan dan desa yang belum terakses dengan baik yaitu Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Mau, dan Kecamatan Ulugawo.
- b). Terbatasnya pembangunan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan kabupaten yang strategis dalam rangka membebaskan keterisolasian desa-desa serta jalan menuju sentra produksi masyarakat.
- c). Irigasi yang telah terbangun belum berfungsi secara optimal dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
- d). Belum optimalnya pemanfaatan prasarana/peralatan (alat-alat berat) kebinamargaan yang ada.
- e). Belum optimalnya pengendalian banjir di beberapa lokasi daerah rawan banjir yang setiap tahun terjadi di beberapa tempat (Kecamatan Gido dan Kecamatan Bawolato).
- f). Belum tersedianya prasarana air minum yang layak.

4.1.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya, tidak terkecuali Kabupaten Nias. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah:

- a). Prasarana dan sarana pendukung mutu pendidikan masih sangat terbatas.
- b). Terbatasnya jumlah tenaga guru di hampir seluruh jenjang pendidikan.
- c). Penerapan kurikulum/KTSP belum optimal.
- d). Kompetensi dan kualifikasi tenaga guru masih terbatas.

4.1.3. Kesehatan

- a). Kualitas pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masih rendah.
- b). Belum optimalnya pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) di bidang kesehatan.
- c). Terbatasnya jumlah dokter dan tenaga paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
- d). Belum optimalnya antisipasi dan kesiagaan menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

4.1.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

- a). Masih tingginya angka kemiskinan
- b). Belum optimalnya peningkatan produksi beras dalam rangka ketahanan pangan.
- c). Belum optimalnya peningkatan produksi komoditas unggulan terutama karet dan kakao.
- d). Sarana prasarana perekonomian belum tertangani secara menyeluruh.
- d). Lemahnya kelembagaan ekonomi kerakyatan (Koperasi) serta Usaha Kecil dan Menengah.
- e). Rendahnya produktivitas petani/ nelayan akibat pengolahan yang masih bersifat tradisional.
- f). Belum terkelolanya potensi sumber daya alam bidang agromarinepolitan.
- g). Kemampuan SDM dan Kelembagaan pertanian masih lemah.
- h). Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian potensi wisata dan budaya Nias
- i). Belum optimalnya Program PNPM dan Program Bantuan Perlindungan Sosial (PKH, BOS, KUBE, dll) dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- j). Masih tingginya angka pengangguran khususnya dikalangan pemuda.

4.1.5. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

- a). Belum tersedianya standar pelayanan minimal (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias;
- b). Kapasitas SDM Aparatur masih rendah;
- c). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
- d). Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik;
- e). Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Arahan RPJM-Nasional Tahun 2010 -2014

Arahan RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Adapun secara umum arah RPJMN ke-2 (2010 -2014) adalah meliputi:

1. Meningkatkan kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia dengan peningkatan kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara,
2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, melalui konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak azasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Selain itu, untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih demokratis melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa,
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikatornya peningkatan pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa,
4. Peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan,

5. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor,
6. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang,
7. Untuk mencapai arah pembangunan Nasional, ditetapkan sebelas Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

4.2.2. Isu-isu Strategis di Tingkat Nasional

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan nasional, beberapa isu-strategis yang menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional meliputi:

a. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

b. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian / lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas

pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/ lembaga dan penanggulangan korupsi.

c. Penegakan Pilar Demokrasi

Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum, misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

d. Penegakan Hukum

Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

e. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

4.2.3. Isu-isu Strategis di Tingkat Provinsi

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan di tingkat Provinsi Sumatera Utara, maka dalam RPJMD Kabupaten Nias mempertimbangkan pula isu-isu strategis yang berkembang secara regional di Provinsi Sumatera Utara. Adapun isu-isu yang berkembang di Daerah Provinsi Sumatera Utara meliputi:

- a. Pemerintahan**, dengan isu strategis sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bermasalah karena dapat menghambat investasi
 - 2) Daya tarik investasi rendah
 - 3) Keterlambatan penyusunan dan penetapan kebijakan dan produk hukum daerah
 - 4) Belum optimalnya implementasi kerjasama antar daerah
- b. Sumberdaya Manusia**, dengan isu strategis sebagai berikut :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok
 - 2) Pengentasan kemiskinan
 - 3) Derajat Kesehatan masih rendah
 - 4) Tingkat pengangguran masih tinggi
 - 5) Kualitas dan Kesejahteraan PNS lingkup Pemprovsumas masih kurang
 - 6) Penerapan wajib belajar 12 tahun
- c. Ekonomi**, dengan isu strategis sebagai berikut :
 - 1) Pertanian; yang menjadi isu strategis adalah: ketersediaan benih, pupuk, pestisida sesuai dengan jumlah, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat tani, konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, perumahan pemukiman dan industri.
 - 2) Pariwisata; dengan isu strategis adalah: pengembangan promosi daerah wisata, penataan informasi daerah tujuan wisata, penataan lokasi obyek-obyek wisata dan infrastruktur pendukung lainnya.
- d. Sarana dan Prasarana**, dengan isu sebagai berikut:
 - 1) Energi: Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru.
 - 2) Infrastruktur: Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- e. Lingkungan Hidup**; yang menjadi isu strategis lingkungan hidup antara lain :
 - 1) Kerusakan Mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut

- 2) Kerusakan lingkungan TNGL dan DAS Wampu
 - 3) Permasalahan lingkungan sektor tambang
 - 4) Pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan
 - 5) Pencemaran udara dan limbah B3
 - 6) Pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba.
- f. Tata Ruang/Wilayah;** yang menjadi isu strategis adalah: pengendalian tata ruang wilayah dan perencanaan tapal batas wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota serta tapal batas hutan dan pemekaran wilayah.
- g. Bencana Alam:** yang menjadi isu strategis adalah: antisipasi dan peringatan dini tentang bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan angin, demikian pula halnya dengan penanggulangan pasca bencana.
- h. Isu Strategis lainnya** antara lain :
- 1) Realisasi peningkatan pelayanan publik (*Good Governance*) yang didukung oleh penegakan hukum yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU tentang kependidikan
 - 3) Realisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.
 - 4) Realisasi pencapaian ketahanan pangan (swasembada).
 - 5) Realisasi pencapaian peningkatan daya beli masyarakat.
 - 6) Realisasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara bertahap.
 - 7) Realisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.
 - 8) Realisasi pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
 - 9) Realisasi pembangunan jalan lingkaran luar (*Outer Ring Road*) Danau Toba.
 - 10) Realisasi pembangunan jalan lingkaran strategis di kabupaten/kota.
 - 11) Realisasi pengembangan dan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan.
 - 12) Realisasi pembangunan jalan susur pantai timur.
 - 13) Realisasi pembangunan jalan Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging (Rawasaring).
 - 14) Realisasi pengembangan pelabuhan Belawan dan pelabuhan lainnya
 - 15) Realisasi pembangunan Mebidang-Ro
 - 16) Realisasi program-program pembangunan Kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan
 - 17) Realisasi pemanfaatan kembali jalur-jalur kereta api yang terbengkalai serta merencanakan pembangunan

jalan kereta api Rantau Prapat – Gunung Tua – Sibuhuan – batas Riau dan merealisasikan jalur Medan – Aceh.

- 18) Realisasi perencanaan pembangunan transportasi massal (MRT) di perkotaan Mebidang-Ro.
- 19) Realisasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi – Junction Kuala Namu
- 20) Realisasi pembangunan Bendungan/Dam Serbaguna Lau Simeme.
- 21) Realisasi pengembangan dan pembangunan kawasan industri di kabupaten/kota
- 22) Realisasi pengembangan kawasan andalan di Sumatera Utara
- 23) Realisasi peningkatan kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar regional, antar strata pemerintahan.

4.2.4. Isu-isu Strategis di Kabupaten Nias

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Nias dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan daerah Provinsi Sumatera Utara, dan sesuai dengan kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Nias serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Nias, maka isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Nias meliputi:

a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (*Good Governance and Clean Government*)

Tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif merupakan elemen penting dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditanamkan budaya baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah yang melayani dengan tulus; tanggap terhadap keluhan masyarakat; profesional dan efisien dalam bekerja dengan motto “Membangun Tanpa Korupsi” *Good governance* bukan hanya bersih dan bebas dari korupsi, tetapi juga harus efektif, responsif, dan akuntabel serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik harus didukung perbaikan tata pemerintahan dan aparatur

meliputi kelembagaan, manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

b. Ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan bidang infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka keterisoliran wilayah khususnya menuju ibukota Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo dan Kecamatan Ma'u; prasarana produksi; dan prasarana dasar dan utilitas umum sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang didukung dengan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna.

c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan

Pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Selain itu pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi.

Adapun pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud sumberdaya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana harus semakin berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang keolahragaan yang membanggakan daerah.

d. Penetapan dan Penataan Ibukota Kabupaten Nias

Pasca pemekaran Tahun 2008, saat ini Kabupaten Nias belum memiliki ibukota kabupaten definitif, dan sementara administrasi pemerintahan masih berpusat di Kota Gunungsitoli. Hal ini sangat mempengaruhi rencana pengembangan wilayah Kabupaten Nias kedepan. Mengingat keberadaan ibukota sebagai pusat pemerintahan yang juga sekaligus sebagai pusat perekonomian daerah.

e. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Isu kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat substansial dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Nias. Hal tersebut terkait dengan fungsi manusia itu sendiri sebagai subjek dan juga sekaligus objek dari kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kelangsungan aktivitas manusia. Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan Kabupaten Nias. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Di Kabupaten Nias, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nias memang cenderung mengalami penurunan yaitu dari 36,19 persen Tahun 2006, turun menjadi 31,75 persen Tahun 2007. Selanjutnya Tahun 2008 turun menjadi 25,19 persen, Tahun 2009 sebesar 22,57 persen dan Tahun 2010 turun menjadi 19,98 persen, tetapi, jumlah penduduk yang terkategori miskin masih cukup besar.

f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Kabupaten Nias merupakan daerah rawan bencana. Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim Kabupaten Nias termasuk rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).

Kesiapsiagaan merupakan modal utama dalam menghadapi bencana. Bencana gempa, tsunami dan banjir yang melanda wilayah Kabupaten Nias telah memberikan banyak pelajaran,

termasuk kesadaran akan arti pentingnya sebuah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Walaupun ancaman bencana alam tidak dapat ditolak dan dielakkan oleh siapa pun juga, tetapi setidaknya Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Nias harus dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui manajemen pengembangan sistem prakiraan bencana beserta penyebarluasan informasi peringatan dini kepada masyarakat (*Early Warning Disaster Preparadnes*) serta pengurangan resiko bencana.

Sasaran upaya PRB dan pengurangan dampak perubahan iklim adalah mengamankan kepentingan pembangunan wilayah dan masyarakat kabupaten Nias dalam jangka panjang. Dari sisi mitigasi, pencapaian sasaran tersebut didahului oleh identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana, kerentanan, kapasitas dan resiko bencana. Berdasarkan pemahaman terhadap distribusi resiko, maka sasaran selanjutnya adalah menyiapkan perangkat kebijakan daerah untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk kepentingan PRB dan pengurangan dampak perubahan iklim.

Dari sisi kesiapsiagaan, sasaran yang ingin dicapai adalah agar Pemerintah Kabupaten Nias, masyarakat, dan pihak swasta mendapatkan informasi dan terlatih untuk menyikapi setiap resiko tersebut, sehingga resiko kematian, kesakitan, kerugian harta benda, serta resiko terhenti totalnya kegiatan produksi akibat bencana dapat diturunkan. Dari sisi kelembagaan, sasaran yang ingin dicapai adalah agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat berfungsi untuk melakukan penyelenggaraan PRB, termasuk upaya pengurangan dampak perubahan iklim, pada tahap sebelum terjadi bencana, tanggap darurat dan saat terjadi bencana, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Peningkatan Investasi

Dalam pelaksanaan proses pembangunan tidaklah mungkin dapat dilakukan hanya dengan mengharapkan peran pemerintah saja, namun pihak swasta dan masyarakat memiliki andil yang besar pula. Perbaikan iklim investasi didaerah merupakan keniscayaan bagi peningkatan investasi daerah. Investasi merupakan salah satu faktor (*push factor*) bagi berkembangnya perekonomian suatu pemerintahan (daerah). Manakala arus investasi tinggi, suatu wilayah akan memungkinkan untuk mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Pada akhirnya, investasi juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi sendiri bisa datang dari dalam negeri (PMDN) dan

bisa berasal dari luar negeri (PMA). Di daerah, investasi itu bisa berasal dari dalam daerah sendiri, dari luar daerah, dan dari luar negeri.

h. Rendahnya kapasitas fiskal daerah

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada Tahun 2010 sebesar 5,24 persen, dengan total PAD (2009) sebesar Rp 17.629.575.120,00. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Nias relatif rendah. Sumber pendapatan utama adalah berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).